



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) TAHUN 2021

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS

Jalan Antara Nomor 445 Bengkalis

Website : www.kesbangpol.bengkaliskab.go.id

Email : kesbangpolbks@yahoo.com



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	4
D. Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	5
E. Struktur Organisasi.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	
A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	12
B. Analisis Kinerja.....	13
C. Realisasi Anggaran.....	20
D. Analisis Efisiensi.....	20
BAB IV PENUTUP.....	25

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Peyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021. Laporan Kinerja ini juga sebagai upaya tindak lanjut jawaban dari rekomendasi yang sebelumnya diberikan oleh TIM SAKIP Kabupaten Bengkalis.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 dan analisisnya, meskipun masih terdapat kekurangan, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. HERMANTO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630310 198702 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sebagai Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Jalan Antara Nomor 445 Bengkalis.

Selain tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2019 diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,

pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Bengkalis.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2021 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 5 (Lima) sasaran dan terdapat 6 (Enam) indikator kinerja sasaran untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2021.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah tercapai, yaitu dari 5 (Lima) indikator kinerja sasaran sebanyak 4 (empat) indikator kinerja utama sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis serta dorongan dan dukungan dari pimpinan dan lintas Perangkat Daerah. Untuk tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Pasal 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Teknis penyusunan dokumen ini juga diatur melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021. Adapun tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2019 dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial

dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Bengkalis.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
2. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2021;

D. Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam upaya mencapai visi misi serta tujuan strategis ditemukan kondisi kecenderungan dan perkembangan situasi dan ancaman bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan permasalahan di daerah yang mengarah pada terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa. Permasalahan utama (strategic issued) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis yaitu :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan

1. Perkembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan saat ini sudah cukup memprihatinkan, ditandai dengan semakin mudarnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat khususnya para generasi muda yang jika berkelanjutan, dikhawatirkan dapat menjerumuskan kejurang kehancuran. Banyak kasus-kasus penyimpangan ideologi di pulau jawa turut mempengaruhi kondusifitas di Kabupaten Bengkalis. Menyikapi permasalahan ideologi tersebut, terbit Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

2. Semakin menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila pada semua elemen masyarakat. Penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideologi, jiwa, dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
3. Rendahnya rasa nasionalisme dan jati diri bangsa serta kurangnya wawasan kebangsaan yang akhirnya mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang mengganggu stabilitas daerah.
4. Kewaspadaan kemungkinan timbulnya konflik antar etnis dan suku bangsa terkait pembauran kebangsaan khususnya kerukunan antar Etnis dan Suku Bangsa di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menyikapi kemungkinan timbulnya konflik etnis dan suku bangsa maka terbitlah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.

2. Bidang Politik Dalam Negeri

1. Terkontaminasinya pola pikir, sikap dan perilaku generasi muda akibat interaksi budaya global yang berdampak pada gaya hidup, kesadaran berpolitik, pelaksanaan hak dan kewajiban serta wawasan kebangsaan.
2. Partisipasi politik masyarakat perlu ditingkatkan.
3. Terbatasnya masyarakat yang memahami kebijakan politik

3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat

1. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap kebudayaan daerah dan seni budaya daerah, sehingga kurang mencintai kebudayaan dan seni budaya daerah.
2. Belum optimalnya koordinasi dibidang ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Masih banyak Organisasi Kemasyarakatan yang belum terdaftar keberadaannya.

4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

1. Belum efektivitas penanganan konflik sosial secara terkoordinir dan terpadu dalam melaksanakan rencana aksi daerah.
2. Peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah terhadap permasalahan yang sensitif dan urgensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah terutama terkait dengan paham radikal dan teroris, aksi/demo unjuk rasa yang anarkis, aliran sesat keagamaan, pertikaian antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu berkaitan dengan kewaspadaan nasional dan daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dengan tidak lanjut membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
3. Peningkatan peran serta dan ikut sertanya para tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dalam membangun bangsa dan negara sebagai wujud rasa keintaan terhadap bangsa dan negara .
4. Peningkatan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah Kabupaten Bengkalis.
5. Peningkatan sinergitas lintas instansi vertikal di daerah dan SKPD terkait dengan kegiatan Keintelijen dalam rangka mendeteksi dini dan memberikan peringatan dini untuk menjaga stabilitas nasional di daerah. Tindak lanjut dari kondisi ini diberlakukannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat.

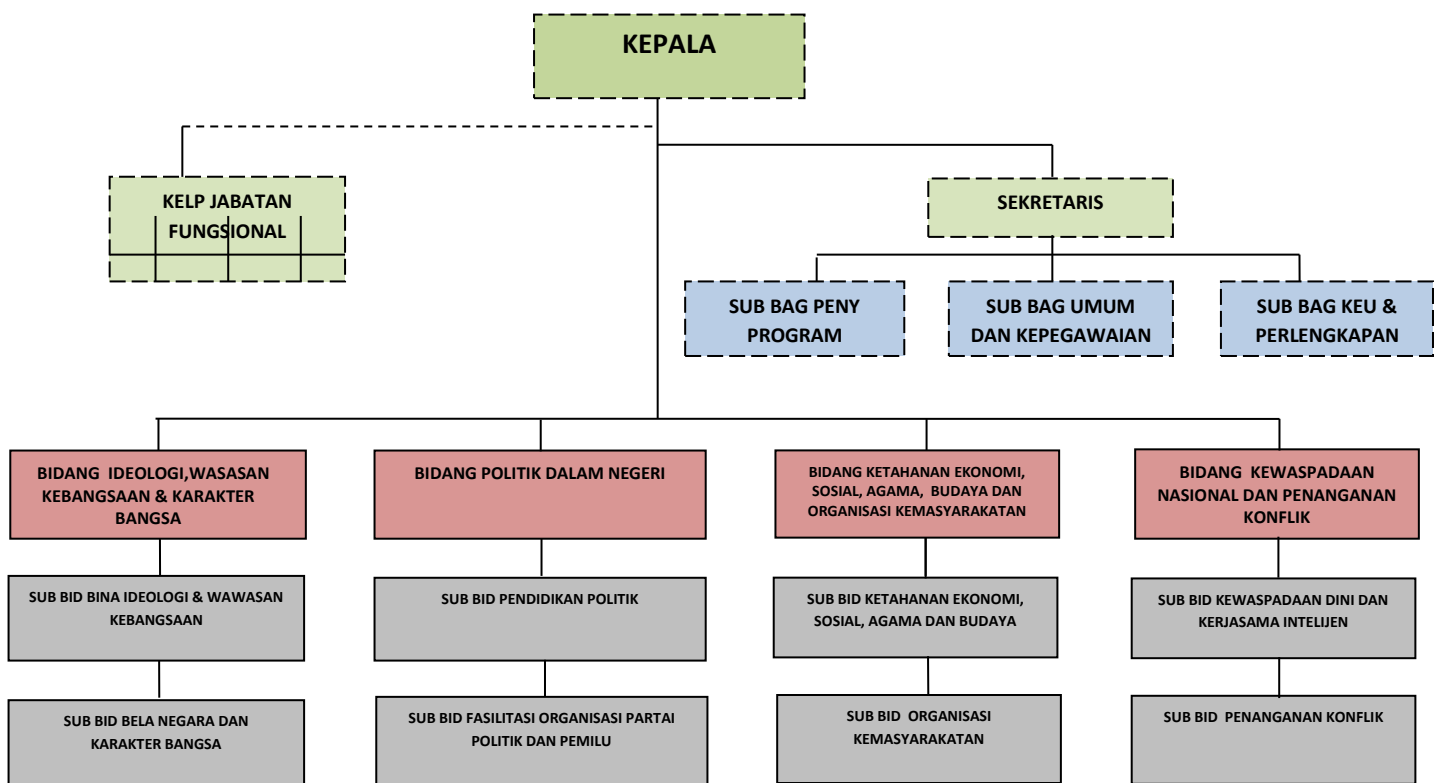
E. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Penyusunan Program
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :
 - Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
- d. Bidang Politik, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pendidikan Politik
 - Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Pemilihan Umum
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya
 - Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 - Sub Bidang Penanganan Konflik

Struktur Organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis dapat digambarkan sebagai berikut :



1.1 Sistematika Penyajian

Laporan akuntabilitas kinerja terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Penjelasan umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek Startegis Organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Penstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila	0,40%	0,40%	0,50%	0,50%	80%	80%
		Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	0,40%	0,40%	0,50%	0,50%	68%	70%
		Persentase peran aktif masyarakat dalam peringatan hari besar nasioal	40%	50%	60%	70%	80%	80%
		Persentase peran aktif masyarakat dalam peringatan hari besar keagamaan	40%	40%	50%	60%	70%	80%
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	2,4%	2,5%	2,6%	2,6%	70%	70%
		Persentase peran aktif masyarakat menjaga KAMTIBMAS	2,4%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%

		Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	50%	50%	60%	60%	80%	80%
4.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu	50%	50%	50%	50%	50%	55%
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	C	CC	B	B	B	B
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	1	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	80%
2.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1	Persentase peran aktif masyarakat pada proses pemilu	55%
3.	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, agama, budaya dan organisasi kemasyarakatan	1	Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	80%
4.	Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	1	Persentase penurunan potensi konflik	70%
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan PD	1	Predikat akuntabilitas kinerja	B
		2	Persentase temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Realisasi s/d Tahun 2021	Target Akhir Tahun (2021) Renstra
			Target	Realisasi	2020	Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila	80%	67%	84%	80%	80%	100%	100%	80%
		Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa	68%	89%	130%	70%	70%	100%	100%	70%
2	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase peran aktif masyarakat pada proses pemilu	50%	71,75%	143%	55%	71,75%	130%	130%	55%
3	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, agama, budaya dan organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	80%	0%	0,0%	80%	40%	50%	50%	80%

4	Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	Persentase penurunan potensi konflik	70%	72%	103%	70%	10%	14,2%	14,2%	70%
---	--	--------------------------------------	-----	-----	------	-----	-----	-------	-------	-----

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan, hal ini dapat dilihat pada realisasi dan capaian kinerja diatas namun terdapat 1 indikator atau target kinerja yang masih rendah realisasi dan capaian sebesar 50% sampai tahun 2021 karena adanya kebijakan perubahan perencanaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

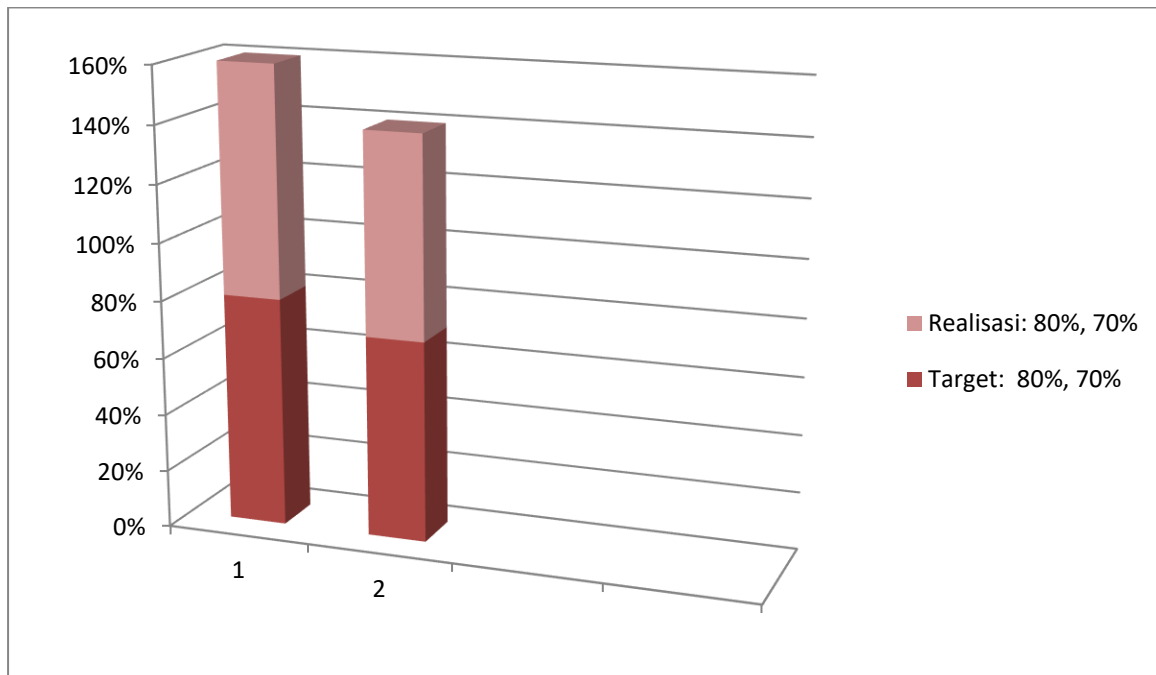
Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan

Indikator	2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila	80%	80%	100%
Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	70%	70%	100%
Rata-Rata Capaian			200%

Adapun capaian kinerja sasaran **Meningkatnya pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan** dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran 1 yaitu **Meningkatnya pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan** dengan indikator **Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila** pada tahun 2021, realisasinya mencapai 100% dari target yang ditentukan sebesar 80% atau capaian pada tahun 2021 menunjukkan capaian 100%. Dapat dilihat realisasi target indikator ini pada tahun 2021 adalah baik.

Sementara untuk indikator **Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan**, dari target yang ditentukan 70% dapat dilihat realisasi sebesar 70% dengan capaian 100%, dengan artian bahwa indikator tersebut mencapai target penetapan kinerja dengan tingkat capaian baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pada sasaran **Meningkatnya pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan** dengan **indikator Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan**, dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dilihat pada hasil capaiannya. Fokus prioritas program dan kegiatan ini pada tahun 2021 menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran 1.

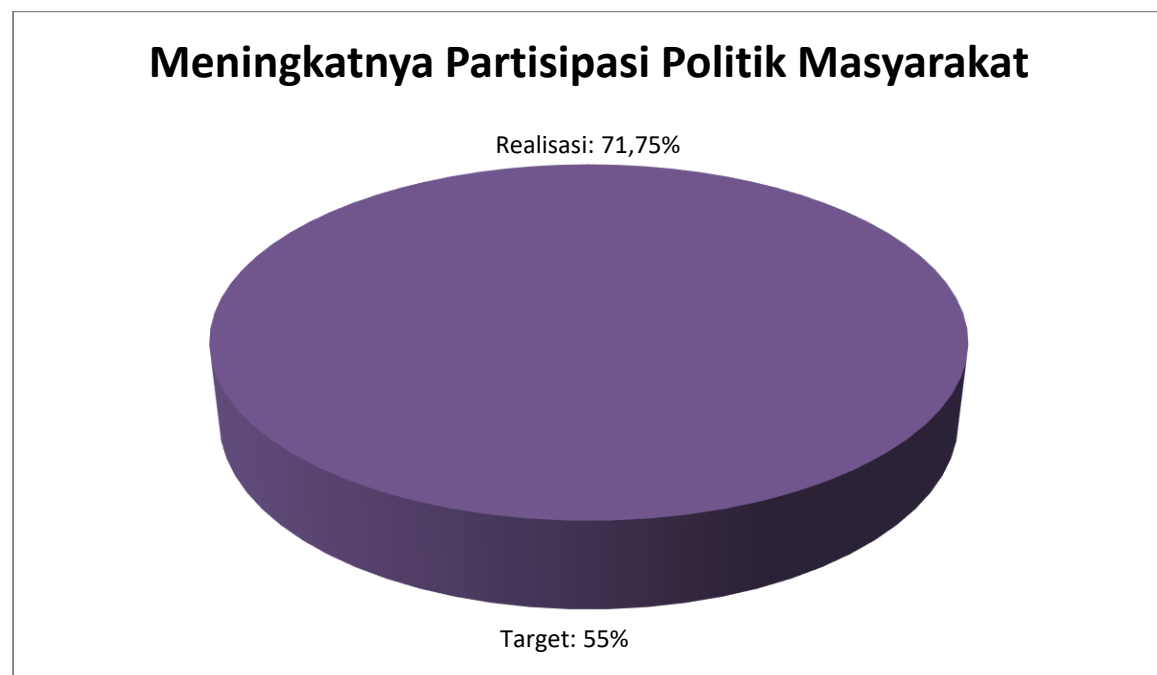
Disamping itu juga dukungan semua pihak terutama stakeholders terkait termasuk anggaran pelaksanaan kegiatan juga tersedia sesuai jadwal kegiatan.

Sasaran 2**Meningkatnya partisipasi politik masyarakat**

Indikator	2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu	55%	71,75%	130%
Rata-Rata Capaian			130%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya partisipasi politik masyarakat** dengan indikator *Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu*, rata-rata capaiannya sebesar 130%. Capaian kinerja pada tahun 2020 target semula sebesar 50% dengan realisasi sebesar 71,75%, diperoleh dari hasil peran aktif masyarakat dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu.

Adapun capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat** dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Pada sasaran **Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat** dengan indikator *Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu* berhasil mencapai rata-rata capaian sasaran sebesar 143%, hal ini terjadi dengan dilakukannya berbagai upaya dari pihak Badan Kesatuan Bangsa dan

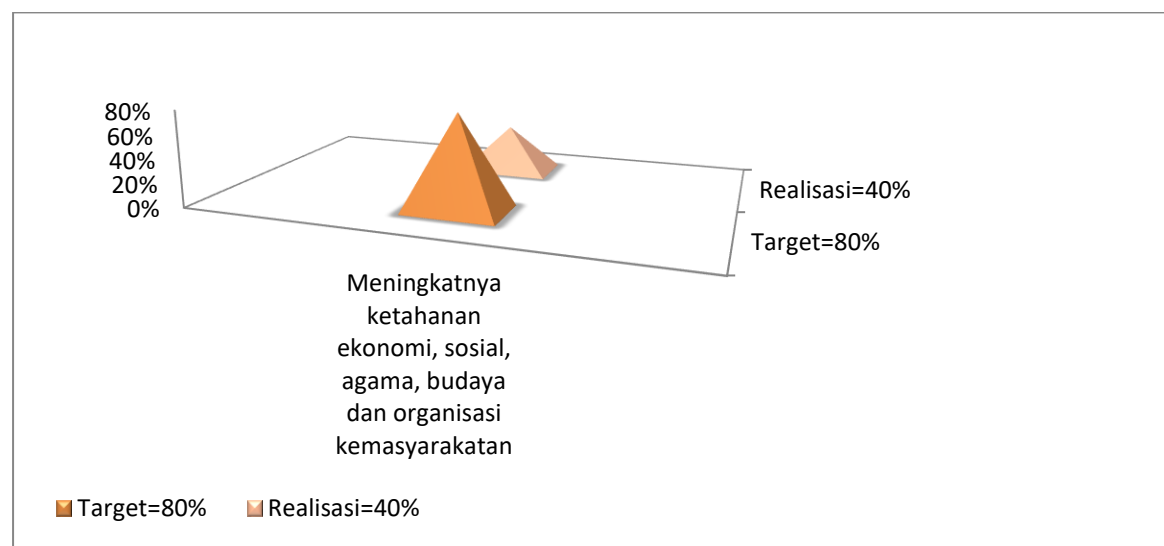
Politik Kabupaten Bengkalis dan didukung oleh stakeholders serta pemangku kepentingan dari elemen aparat penegak hukum/ masyarakat agar meningkatnya pendidikan politik masyarakat. Adapun upaya tersebut seperti dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui media, baik media elektronik dan publikasi (baliho dan spanduk) yang dipasang dilokasi strategis di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Dari capaian indikator ini dapat disimpulkan bahwa indikator ini berhasil dengan baik dilihat dari peningkatan peran aktif dan partisipasi politik masyarakat terhadap Pemilu.

Sasaran 3

Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, agama, budaya dan organisasi kemasyarakatan

Indikator	2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	80%	40%	50%
Rata-Rata Capaian			50%

Adapun capaian kinerja sasaran **Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, agama, budaya dan organisasi kemasyarakatan** dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, agama, budaya dan organisasi kemasyarakatan** dengan indikator Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan

pembinaan terdapat realisasi 40% dari target 80% dengan capaian sebesar 50%. Kegiatan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2021 dilaksanakan pada 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Mandau dan Pinggir.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan

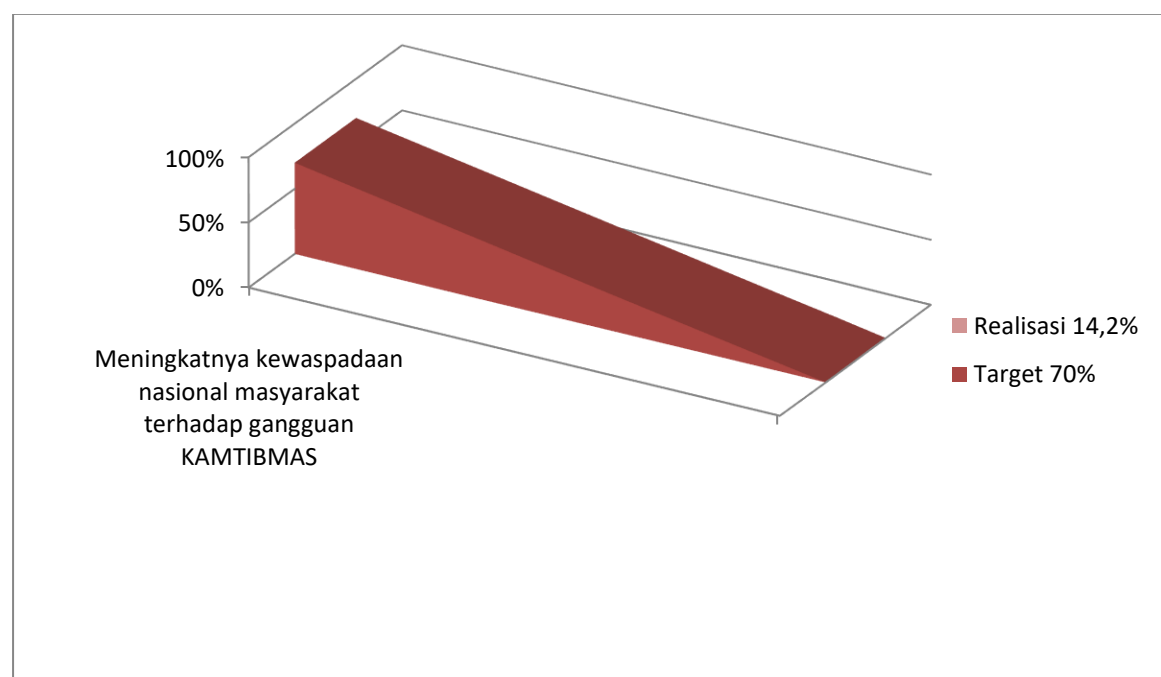
Karena kebijakan perubahan rencana anggaran dalam penanganan pandemi Covid 19 sehingga dilakukan refocusing anggaran OPD tahun 2021.

Sasaran 4

Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS

Indikator	2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penurunan potensi konflik	70%	14,2%	14,2%
Rata-Rata Capaian			14,2%

Adapun capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS** dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS** dengan indikator **Persentase penurunan potensi konflik** capaiannya sebesar 14,2%. Hal ini dikarenakan terdapat kegiatan yang fokus pada pembinaan kepada masyarakat tentang kewaspadaan dini dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, dan adanya dukungan oleh aparat penegak hukum serta masyarakat Kabupaten Bengkalis itu sendiri.

Sementara dari target indikator yang ditetapkan dan hasil realisasi target pada indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat sehingga gangguan KAMTIBMAS dapat dicegah sekaligus potensi konflik menurun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pada sasaran **Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS**, rata-rata capaiannya sudah baik, hal ini dikarenakan meningkatnya kewaspadaan masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkalis melalui pelaksanaan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat seperti dilakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya peredaran narkoba dan miras dan dukungan FPK, FKDM, FKUB Kabupaten Bengkalis dan aparat penegak hukum. Diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat mendapatkan kondisi yang aman dan tertib melalui pengembangan potensi dan kekuatan masyarakat sendiri dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Kembali pada Fokus prioritas program dan kegiatan ini pada tahun 2021 menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran ini.

Sasaran 5

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator	2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Predikat akuntabilitas kinerja	B	B	100%
Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			100%

Adapun capaian kinerja sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja** dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja** dengan indikator **Predikat akuntabilitas kinerja** realisasi adalah B dengan capaiannya 100%, Pada Tahun 2019 Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis masuk kelompok 10 (sepuluh) besar OPD yang mendapat Predikat B dengan Nilai 61,22. Pada Tahun 2020 kembali mendapat Predikat B dengan Nilai 61,43. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sudah menunjukkan hasil yang **Baik** namun masih memerlukan perbaikan. Untuk **Persentase temuan yang ditindaklanjuti** realisasi 100% dengan capaian 100% dan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis masuk 10 (sepuluh) OPD yang telah menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pada sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja**, rata-rata capaiannya sudah baik, masing-masing indikator dengan capaian B dan 100%, hal ini dikarenakan adanya komitmen seluruh jajaran ASN mendukung pemenuhan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati bersama dan upaya meningkatkan kinerja pada sasaran ini.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja non gaji dan tunjangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.932.481.903,- atau 80,70 % dari pagu sebesar Rp. 4.872.974.291,-. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran **Meningkatnya pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan** yaitu sebesar 83,93%. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran **Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS** yaitu 35,78%. Hal ini disebabkan adanya faktor antara lain : a. belum ada Perda dan Perbup P4GN sehingga SOP P4GN Kecamatan belum terbentuk, b. belum Terbentuknya Timdu Pengawasan Ormas, c. kebijakan perubahan perencanaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sehingga prioritas anggaran untuk menanggulangi pandemi covid 19.

Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2021 sesuai sasaran sebagai berikut:

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	100%	Rp. 312.681.700,-	Rp. 262.435.376,-	83,93%
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	100%	Rp. 79.976.600,-	Rp. 68.806.600,-	86,03%
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, agama, budaya dan organisasi kemasyarakatan	100%	Rp. 77.120.000,-	Rp. 70.649.998,-	91,61%
Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	100%	Rp. 656.043.700,-	Rp. 269.456.099,-	88,6%
Total		Rp. 1.125.822.000,-	Rp. 671.348.073,-	90,8%

C. Analisis Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai 100%. Terlihat bahwa hanya 1 (satu) sasaran menunjukkan pencapaian 91,61%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

No.	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, agama, budaya dan organisasi kemasyarakatan	50	91,61	4,2

1.1 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 10.179.108.908,-** dengan **realisasi keuangan sebesar Rp. 8.510.018.149,-** atau **setara 83,60%**, sedangkan realisasi fisik **sebesar 99,84%**, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. *Anggaran Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* sebesar **Rp. 5.306.134.617,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.577.536.246,-**, atau sebesar 52,31%.
- b. *Anggaran Belanja selain Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* sebesar **Rp. 4.872.974.291,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.932.481.903,-**, atau sebesar 80,70%.

Adapun rincian realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan	%	Fisik %
1	2	3	4	5
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.179.108.908	8.510.018.149	83,60	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.051.111.591	1.571.432.630	76,61	100
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188,954,700	171.178.500	79,02	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	161,882,300	152.422.100	94,16	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15,538,800	8.823.800	56,79	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11,533,600	9.932.600	86,12	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,306,134,617	4.577.536.246	52,31	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,306,134,617	4.577.536.246	52,31	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	115,200,000	107.200,000	93,06	100

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	115,200,000	107.200,000	93,06	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114,340,000	86.766.000	75,88	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	114,340,000	86.766.000	75,88	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	976,363,200	719.619.881	73,37	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,635,000	5.063.200	52,55	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85,575,600	71.110.850	83,10	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72,260,000	67.460.000	93,36	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55,347,600	30.871.300	55,78	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,900,000	7.200.000	72,73	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	585,045,000	398.314.531	68,08	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	158,600,000	139.600.000	88,02	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61,593,000	45.335.000	73,60	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61,593,000	45.335.000	73,60	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204,422,691	123,556,085	69,92	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73,950,000	35.250.000	47,67	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111,272,691	69.106.085	62,11	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19,200,000	19,200,000	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390,238,000	317,777,164	84,28	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132,837,000	109.099.019	87,78	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153,600,000	115.200.000	75,00	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103,801,000	93.478.145	90,06	100
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	312,681,700	262,435,376	83,93	100
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	312,681,700	262,453,376	84,11	100
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	177,615,100	147.061.776	82,80	100
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	135,066,600	115,373,600	85,42	100

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,776,017,300	1.758.507.800	99,01	100
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1,776,017,300	1.758.507.800	92,83	100
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	79,976,600	68.806.600	86,03	100
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,696,040,700	1.689.701.200	99,63	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	77,120,000	70.649.998	91,61	100
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	77,120,000	70.649.998	93,15	100
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	47,200,000	40.729.998	86,29	100
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	29,920,000	29,920,000	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	452,473,600	161.875.999	35,78	97,57
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	452,473,600	161.875.999	35,38	95,14
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	278,633,000	103.340.999	37,09	95,14
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	173,840,600	58.535.000	33,67	100
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	203,570,100	187.580.100	52,85	100
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	203,570,100	187.580.100	53,04	100
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	119,852,200	78.482.200	65,48	100

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9,173,300	5.713.300	62,28	100
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	74,544,600	23.384.600	31,37	100

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021 bila dilihat tabel diatas, sudah mencapai kinerja maksimal baik untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Namun penyerapan anggaran apabila dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan khusus pada Belanja Non Gaji dan Tunjangan belum terealisasi sesuai target kineja yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Hal ini terkait adanya Kebijakan Perubahan Perencanaan Anggaran dalam rangka penanganan bencana non alam Covid 19 sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya dilakukan penyesuaian dengan jadwal kegiatan awal, disamping itu juga belum adanya regulasi dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Keputusan Bupati Bengkalis untuk pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

P E N U T U P

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah dilaksanakan secara optimal, apabila dilihat dari rata-rata capaian terhadap 6 (enam) indikator kinerja.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator kinerja pada Badan Kesbang dan Politik antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran ASN Badan Kesbang dan Politik yang berpedoman kepada Perjanjian Kinerja yang sebelumnya telah ditentukan. Namun demikian untuk tahun 2022, Badan Kesbang dan Politik tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis perlu dukungan dan komitmen secara aktif semua pihak sehingga benar-benar dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai bukti nyata komitmen penerima amanah bukan hanya menjadi wacana dan polemik pemikiran semata-mata.
2. Optimalisasi mekanisme internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun mendatang harus lebih memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga diharapkan permasalahan yang muncul dapat diminimalisir agar tidak mempengaruhi realisasi maupun capaian indikator kinerja.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas Program dan kegiatan khususnya dengan Pemerintah Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

5. Dilakukan upaya-upaya guna mengantisipasi hambatan/masalah yang dapat mempengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :
 - a). Kecermatan dalam perencanaan dan diikuti pengawasan yang ketat agar sinkronisasi antara rencana kegiatan dan anggaran lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
 - b). Komitmen dari pejabat yang telah mengikat diri dalam Perjanjian Kinerja bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis untuk benar-benar mengimplementasikan indikator program dan sasaran kegiatan masing-masing sesuai yang telah diperjanjikan.
 - c). Memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sehingga penetapan kinerja dapat didukung oleh informasi dan data lapangan yang lebih akurat.
 - d). Terkait penyelenggaraan program dan kegiatan harus selaras, efisiensi, efektifitas dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.
 - e). Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada melalui keikutsertaan dalam berbagai pelatihan, sosialisasi, bimtek dan workshop terhadap perubahan ketentuan dan peraturan.